

Judul : Ada Kementerian Haji, kasus korupsi kuota jangan terulang lagi
Tanggal : Sabtu, 13 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Ada Kementerian Haji

Kasus Korupsi Kuota Jangan Terulang Lagi

ANGGOTA Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mendukung pembentukan lembaga baru Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini dipimpin Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan didampingi wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Maman meminta Kementerian Haji dan Umrah tidak terjebak pada masalah klasik, yakni korupsi. Kasus korupsi kuota haji yang terjadi pada tahun 2024 harus menjadi peringatan keras dan tidak boleh terulang kembali di masa yang akan datang.

Praktik korupsi dalam pengelolaan haji, lanjutnya, merugikan negara dan menyakiti perasaan umat Islam yang menunaikan rukun Islam kelima dengan penuh pengorbanan. Setiap tahun jutaan umat Islam menabung selama bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci. "Ketika ada penyalahgunaan kuota atau penyimpangan anggaran, itu artinya negara gagal melindungi hak jemaah," kritik Maman.

Maman mendesak, penyelenggaraan ibadah haji ke depan harus semakin profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan jemaah. Hal ini mencakup manajemen kuota, sistem digitalisasi pendaftaran, transparansi biaya, penyediaan akomodasi dan transportasi yang layak, hingga penguatan layanan kesehatan.

Jemaah haji, lanjutnya, harus berangkat dengan tenang dan kembali dengan selamat. Negara berkewajiban memastikan semua aspek perjalanan dan ibadah berjalan lancar. Untuk itu dibutuhkan tata kelola yang profesional, bukan sekadar seremoni atau kepentingan politik semata.

Komisi VIII DPR kata Maman siap bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam membangun sistem penyelenggaraan haji yang bersih. "Namun, kami akan menjadi mitra kritis agar setiap rupiah dan setiap kuota haji digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah," kata Maman menekankan.



Maman Imanulhaq

ngan jemaah," kata Maman menekankan.

Dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah, Maman berharap kepercayaan umat terhadap penyelenggaraan haji semakin meningkat, dan Indonesia bisa menjadi contoh negara yang sukses mengelola ibadah haji secara modern, transparan, dan

bebas dari praktik korupsi.

Maman mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk kementerian baru yang fokus pada penyelenggaraan haji dan umrah. "Kehadiran kementerian ini menandai keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah," puji dia.

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Janurutmoko optimistis, Kementerian Haji dan Umrah akan menjalankan tata kelola penyelenggaraan haji menjadi lebih baik. Otoritas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah memiliki posisi kuat, anggaran lebih jelas, dan koordinasi yang lebih solid dengan kementerian/lembaga lainnya.

Menurut Singgih, perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah dan DPR dalam merespons aspirasi serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umrah selama ini.

Singgih menambahkan, perubahan kelembagaan dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar perubahan nomenklatur, tapi sebuah lompatan besar dalam upaya Pemerintah dalam melakukan reformasi struktural yang fundamental. ■ TIF